

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Albania adalah salah satu negara terkecil di Eropa yang memiliki luas 28.748 km². Ibukota Albania adalah Tirana yang memiliki jumlah penduduk sekitar 727.000 jiwa. Letak Albania berada di Selatan Eropa Timur yang berbatasan dengan Montenegro, Kosovo, Republik Makedonia dan Yunani, di sebelah barat dan barat daya memiliki pantai di Laut Adriatik dan Laut Ionia.¹

Sejak tahun 1912, Albania adalah sebuah negara yang merdeka setelah dipisahkan dari Kekaisaran Ottoman, namun pada tahun 1939 Italia berhasil menaklukkan Albania, tetapi tahun 1945 komunis berhasil mengambil alih kekuasaan hingga awal 1990-an. Pada tahun 1992 Sali Berisha menjadi presiden non-komunis pertama setelah merdeka dari pemerintahan komunis. Pada saat pemerintahan Sali Berisha, Albania merupakan negara anggota PBB, NATO, Dewan Eropa dan Organisasi Perdagangan Dunia. Sejak Januari 2003 Albania menjadi calon anggota potensial untuk akses ke Uni Eropa dan pada tanggal 28 April 2009 Albania secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan ke Uni Eropa.² Upaya Albania untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa tersebut bertujuan untuk meningkatkan perekonomian dan memperbaiki sistem pemerintahan dinegaranya, karena apabila Albania berhasil menjadi salah satu

¹ A.J. Herweijer dan W.J.M Heijman, 2010, *Albania: Economic Prospect of European Union Membership*, Diakses dari <http://www.vps.ns.ac.rs/SB/2010/4.1.pdf> pada tanggal 26 Maret 2017 [19.26 WIB] Hal.2

² *About European Union*, Diakses dari https://europa.eu/european-union/about-eu/history/1945-1959_en pada tanggal 26 Maret 2017 [19.42 WIB]

anggota dari Uni Eropa maka Albania akan memperoleh beberapa keuntungan-keuntungan tersebut.³

Uni Eropa sendiri dibentuk dengan tujuan untuk mengakhiri perang antara negara tetangga yang memuncak dalam Perang Dunia II. Pada tahun 1950, gerakan yang disebut dengan *The European Coal and Steel Community* (ECSC) mulai menyatukan negara-negara Eropa secara ekonomi dan politik untuk menjamin perdamaian negara-negara anggota. Enam negara pendiri Uni Eropa adalah Belgia, Perancis, Jerman, Italia, Luksemburg dan Belanda. Pada tahun 1957 Perjanjian Roma menciptakan Masyarakat Ekonomi Eropa dan Masyarakat Energi Atom Eropa, lalu tahun 1965 dibentuknya perjanjian Merger dan dilanjutkan dengan pembentukan *Single European Act* pada tahun 1986, hingga akhirnya Uni Eropa dibentuk pada 7 Februari 1992 dengan ditandatanganinya perjanjian Maastricht, dan mulai berlaku pada 1 November 1993.⁴

Kemampuan Uni Eropa untuk menerima anggota baru sembari mempertahankan momentum integrasi Eropa, juga merupakan pertimbangan penting untuk kepentingan umum Uni Eropa dan negara-negara kandidat. Pada bulan Desember 1995 di Madrid, Dewan Eropa merujuk pada kebutuhan untuk menciptakan kondisi bagi integrasi secara bertahap dan harmonis dari negara-negara pemohon, terutama melalui pengembangan ekonomi pasar, penyesuaian struktur administratif dan penciptaan lingkungan ekonomi serta moneter yang

³ Besa Shahini dan Petrit Dollani, 2011, *Costs and Benefit of European Integration- The Albanian Case*, Diakses dari <http://wrsj.sjol.eu/download.php?id=489b8899d98c28e8b5319738807109885d0e68c> pada tanggal 24 September 2018 [22.13WIB] Hal. 203-205

⁴ *Ibid.* Hal. 31

stabil. Persyaratan Tata Ruang dan Proses Desentralisasi yang ditetapkan oleh Dewan Eropa pada tanggal 31 Mei 1999. Pada bulan Desember 2006, Dewan Eropa sepakat bahwa strategi perluasan berdasarkan konsolidasi, persyaratan dan komunikasi akan dikombinasikan dengan kapasitas Uni Eropa untuk mengintegrasikan anggota baru yang membentuk dasar konsensus mengenai perluasan anggota.⁵

Pada tahun 1993 Dewan Uni Eropa di Kopenhagen, mengambil langkah yang menentukan untuk negara-negara di Eropa Tengah dan Timur yang menginginkan untuk menjadi anggota Uni Eropa. Dewan Eropa membuat kriteria keanggotaan dimana disebut dengan sebutan Kriteria Kopenhagen yang meliputi:

- Institusi yang menjamin demokrasi, supremasi hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menghormati serta melindungi minoritas.
- Ekonomi pasar yang berfungsi dan kapasitas untuk mengatasi tekanan pasar serta persaingan dalam pasar bebas.
- Mengadopsi keseluruhan kerangka hukum Uni Eropa yang dikenal sebagai “*acquis communautaire*”.⁶

Perluasan keanggotaan juga dibahas di *Copenhagen European Council* pada tahun 1993 dan *Madrid European Council* pada tahun 1995. Dewan Eropa

⁵ European Commission, 2011, *Commission Opinion on Serbia's Application for Membership of the European Union*, diakses dari https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/pdf/key_documents/2011/package/sr_rapport_2011_en.pdf pada 21 Mei 2017 [21.22 WIB] hal.3

⁶ Paulina Rezler, 2011, *The Copenhagen Criteria: Are They Helping or Hurting the European Union?*, *Touro international law review*, volume 14 no.2, hal. 392

Madrid pada tahun 1995 juga menambahkan persyaratan bahwa syarat untuk akses harus diciptakan melalui penyesuaian struktur administratif.⁷

Untuk menjadi anggota dari Uni Eropa tidaklah mudah, Uni Eropa membuat standar peraturan yang harus dipenuhi. Termasuk pemerintahan yang demokratis, dan dengan ini Albania terus membenahi sistem pemerintahannya agar menjadi negara yang demokratis.⁸ Namun untuk dapat merubah sistem pemerintahan menjadi demokrasi, Albania masih harus melakukan upaya lebih banyak, karena laju demokratisasi di Albania akan terlalu lambat jika konflik internal masih belum dapat diselesaikan secara baik.⁹ Selain permasalahan demokratisasi, Albania masih memiliki beberapa permasalahan yang harus diselesaikan dalam upayanya untuk menjadi anggota Uni Eropa. Secara umum proses stabilisasi dan asosiasi Albania ditandai oleh kurangnya reformasi yang berkelanjutan, kemajuan perekonomian yang sangat lamban, ketidakstabilan politik, tingginya tingkat korupsi di antara pejabat negara, perdagangan narkoba, pencucian uang, tingkat pengangguran yang tinggi, ketidakmampuan untuk menerapkan undang-undang serta ketidakmampuan untuk mengatur pemilihan pemimpin negara maupun daerah yang bebas dan adil. Kenyataan bahwa

⁷ Elda Nasho Ah Pine, *Albania Inegration into the UE: Security, Europeanization, Democratization: Wich Project for the Democracy?* Iceland: 6th ECPR General Conference. Agustus 2011, hal.393

⁸ Jan Zielonka, 2006, *The United States, the European Union and the Consolidation of Democracy in Easten Europe*, Diakses dari <http://users.ox.ac.uk/~polf0040/Democracy.Promotion.doc> pada tanggal 26 Maret 2017 [20.01 WIB]

⁹ Cemal Baltaci dan Reina Zenelac, 2013, *Democracy Promotion in Albania*, Electronic Journal of Social Sciences, Vol.3 No.44, Hal.3

permasalahan internal tersebut menjadi cukup serius bagi Albania yang ingin bergabung dengan Uni Eropa.¹⁰

Untuk menjadi anggota dari Uni Eropa Albania harus memenuhi Kriteria Kopenhagen. Albania sendiri merupakan negara yang demokrasinya tergolong baru, sehingga dikhawatirkan tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut. Albania sendiri sempat mengalami penolakan selama tiga kali dalam kurun tahun 2009-2014. Penolakan tersebut pertama kali terjadi pada tahun 2009 yang disebabkan oleh adanya konflik politik antara partai oposisi dan pemerintah yang terjadi di Albania. Penolakan selanjutnya terjadi pada tahun 2010, penolakan karena kelanjutan dari konflik politik yang terjadi di Albania pada tahun 2009. Penolakan yang ketiga terjadi pada tahun 2013, dimana penolakan tersebut terjadi karena adanya permasalahan dalam pemerintahan Albania yang tidak mampu menyelesaikan permasalahan korupsi. Namun upaya Albania untuk memenuhi Kriteria Kopenhagen membuahkan hasil yang baik. Albania berhasil mendapatkan status calon anggota pada tahun 2014¹¹, meskipun akses untuk menjadi anggota Uni Eropa belum dilakukan, namun hal itu membuktikan bahwa upaya-upaya yang dilakukan Albania untuk memenuhi Kriteria Kopenhagen cukup berhasil. Oleh karena itu, penulis akhirnya mengangkat topik ini dengan judul “*Upaya Albania Bergabung dengan Uni Eropa dengan Memenuhi Kriteria Kopenhagen*”

1.2 Rumusan Masalah

¹⁰ Arian Starova, 2005, *Albania on its Way to the European Union*, Diakses dari <http://hrcak.srce.hr/file/10037> pada tanggal 16 Mei 2017 [22.21 WIB], hal.133

¹¹ Reuters, 2019, *EU Delays Decision on Membership Talks with Albania*, Diakses dari <https://www.voanews.com/europe/eu-delays-decision-membership-talks-albania-north-macedonia> pada 21 Juli 2019 [14.41 WIB]

Dari latar belakang tersebut pokok permasalahan yang penulis ajukan untuk diteliti adalah “Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan memenuhi Kriteria Kopenhagen?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa, secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui apa itu Kriteria Kopenhagen serta tujuan dari Uni Eropa menetapkan Kriteria Kopenhagen sebagai syarat keanggotaan.
- b. Untuk mengetahui apa saja upaya-upaya yang dilakukan oleh Albania untuk memenuhi Kriteria Kopenhagen, baik upaya internal maupun upaya eksternal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan tambahan dan informasi pembelajaran yang membahas terkait dengan Uni Eropa dan upaya Albania yang ingin bergabung dengan Uni Eropa dengan cara memenuhi Kriteria Kopenhagen, serta untuk menjelaskan isi dari Kriteria Kopenhagen yang digunakan sebagai syarat utama penerimaan calon anggota Uni Eropa.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta menambah wawasan terhadap diri sendiri dan lembaga pendidikan yang dapat mendukung proses belajar mengajar. Serta dapat digunakan sebagai bahan pembelajaran studi Hubungan Internasional khususnya untuk studi kawasan Eropa yang dapat digunakan oleh dosen maupun mahasiswa, mengenai upaya Albania yang ingin bergabung dengan Uni Eropa dan mengenai integrasi kawasan Eropa.

1.5 Penelitian Terdahulu

Untuk melengkapi tinjauan pustaka maka akan disertakan juga beberapa penelitian terdahulu. Penelitian pertama yang ditulis oleh **Fany Dastanta** dalam tesisnya yang berjudul **Implikasi Penerimaan Siprus Dalam Keanggotaan Uni Eropa Terhadap Penerimaan Turki Dalam Keanggotaan Uni Eropa**.¹² Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang bagaimana perluasan keanggotaan Uni Eropa. Perluasan keanggotaan Uni Eropa tersebut akhirnya mendorong negara-negara lain di wilayah Eropa yang ingin bergabung dengan Uni Eropa berusaha untuk melakukan hubungan baik dengan Uni Eropa. Dalam melakukan penerimaan anggota baru Uni Eropa mengharuskan calon anggota barunya memenuhi mekanisme serta persyaratan yang diajukan oleh Uni Eropa. Siprus yang merupakan salah satu negara yang berada di kawasan Eropa berusaha ingin bergabung dengan Uni Eropa. Siprus sendiri berusaha memenuhi persyaratan yang diajukan Uni Eropa agar dapat bergabung dengan Uni Eropa. Siprus sendiri berusaha memenuhi kriteria *Copenhagen* dimana kriteria tersebut didalamnya

¹² Fany Dastanta, 2009, *Implikasi Penerimaan Siprus dalam Keanggotaan Uni Eropa Terhadap Penerimaan Turki dalam Keanggotaan Uni Eropa*, Tesis, Jakarta: Program Pasca Sarjana Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta, Hal (1-111)

memuat persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon anggota baru Uni Eropa. Hingga akhirnya usaha yang dilakukan oleh Siprus berhasil, Siprus berhasil memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Uni Eropa sehingga Siprus berhasil menjadi anggota baru dari Uni Eropa. Namun penerimaan Siprus sebagai anggota dari Uni Eropa ini justru dianggap sebagai faktor penghambat bagi Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa. Tesis ini memiliki bahasan yang sama dengan peneliti. Dengan mengangkat topik yang sama, yaitu usaha sebuah negara untuk bergabung dengan organisasi regional. Tesis yang ditulis oleh Fany Dastanta ini didalamnya juga membahas bagaimana Siprus berusaha untuk menjadi anggota baru dari Uni Eropa.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis tersebut menggunakan metode eksplanatif dengan menggunakan pendekatan neo-liberal institusion. Tesis ini memiliki kesamaan dengan skripsi peneliti yaitu adanya kesamaan yang membahas tentang upaya suatu negara yang mengajukan permohonan keanggotaan kepada Uni Eropa. Namun tesis ini juga memiliki perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu pada negara yang mengajukan permohonan keanggotaan terhadap Uni Eropa. Pada skripsi peneliti menjelaskan mengenai upaya Albania yang mengajukan permohonan keanggotaan terhadap Uni Eropa, sedangkan pada tesis yang ditulis oleh Fany Dastanta menjelaskan upaya Siprus yang mengajukan permohonan keanggotaan terhadap Uni Eropa. Sehingga tesis ini dapat menjadi acuan untuk peneliti karena dalam skripsi ini sama-sama terdapat penjelasan mengenai upaya-upaya yang dilakukan oleh suatu negara agar dapat menjadi anggota dari Uni Eropa.

Penelitian kedua yang ditulis oleh **Wira Kurnia** dalam skripsinya yang berjudul **Diplomasi Turki: Studi Tentang Langkah-Langkah Turki Untuk Menjadi Anggota Uni Eropa Pada Masa Perdana Menteri Erdogan (2002-2007)**¹³. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana sistem pemerintahan Turki dibawah kepemimpinan Erdogan. Turki dibawah pemerintahan Erdogan berusaha untuk bergabung dengan Uni Eropa. Untuk mempermudah langkahnya yang ingin bergabung menjadi anggota Uni Eropa, Erdogan berusaha melakukan diplomasi dengan Uni Eropa. Erdogan melakukan berbagai hubungan kerjasama dengan Uni Eropa, seperti kerjasama dalam hubungan politik, ekonomi, sosial maupun kultural dengan pembukaan sejumlah asosiasi antara Turki dengan insitusi yang menaungi anggota-anggota dari Uni Eropa.

Turki sendiri memiliki alasan mengapa ingin bergabung dengan Uni Eropa. Hal-hal yang melatarbelakangi upaya turki bergabung dengan Uni Eropa anatar lain karena faktor keberhasilan ilmiah dan kemajuan teknologi yang terlebih dahulu telah sukses dicapai oleh peradaban barat, kesatuan yang dimiliki oleh negara-negara yang menjadi anggota dari Uni Eropa serta keadaan politik dan ekonomi dari negara-negara anggota Uni Eropa yang dianggap memiliki politik sistem politik dan ekonomi yang stabil. Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Turki untuk mencapai keanggotaannya dengan Uni Eropa, kendal tersebut datang dari Turki sendiri dan juga dari beberapa nggota Uni Eropa. Meskipun terdapat beberapa kendala, Turki dibawah kepemimpinan Erdogan

¹³ Wira Kurnia, 2016, *Diplomasi Turki: Studi Tentang Langkah-Langkah Turki Untuk Menjadi Anggota Uni Eropa Pada Masa Perdana Menteri Erdogan (2002-2007)*, Jakarta: Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal. 1-76

tetap optimis dan berusaha agar berhasil menjadi salah satu anggota dari Uni Eropa. Didukung dengan kondisi Uni Eropa yang saat itu berusaha melakukan perluasan keanggotaannya. Namun upaya yang telah dilakukan oleh Turki ternyata tidak mendapat hasil yang maksimal, karena beberapa negara anggota Uni Eropa memberikan penolakan atas keinginan Turki yang berupaya bergabung dengan Uni Eropa. Turki dianggap belum memenuhi kriteria *Copenhagen* yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh negara calon anggota Uni Eropa. Skripsi ini memiliki pembahasan yang sama dengan apa yang penulis sedang teliti, karena didalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana upaya-upaya yang dilakukan Turki untuk mencapai keanggotaan dengan Uni Eropa.

Pada skripsi tersebut menggunakan metodologi deskriptif dengan menggunakan pendekatan diplomasi multilateral. Pada skripsi yang ditulis oleh Kurnia Wira ini memiliki persamaan dengan peneliti yaitu menjelaskan tentang upaya negara untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa, yang membedakan disini adalah skripsi tersebut mengambil negara Turki dalam studi kasusnya, dan lebih menekankan upaya diplomasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa serta terdapat juga upaya penolakan dari Uni Eropa karena Turki dianggap tidak mampu memenuhi Kriteria Kopenhagen, sedangkan dalam skripsi peneliti lebih menekankan pada upaya Albania untuk memenuhi Kriteria Kopenhagen. Skripsi ini menjadi acuan untuk mengetahui lebih dalam isi dari Kriteria Kopenhagen.

Penelitian ketiga ditulis oleh **Panji Noor Hamzah** dalam skripsinya yang berjudul “**Bergabungnya Kroasia Menjadi Anggota Uni Eropa**”¹⁴ dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang bagaimana Kroasia bergabung dengan Uni Eropa. Kroasia sendiri merupakan negara yang dulunya pernah bergabung dengan Yugoslavia, namun pada akhirnya Kroasia memisahkan diri dengan Yugoslavia. Setelah merdeka dari Yugoslavia akhirnya Kroasia memutuskan untuk bergabung dan menjadi anggota dari Uni Eropa, karena pada saat itu Uni Eropa berusaha untuk memperluas keanggotaannya di wilayah Balkan Barat, dimana Kroasia merupakan salah satu negara di Eropa yang berada di wilayah Balkan Barat. Untuk mencapai keanggotaan Uni Eropa, Kroasia harus berusaha memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Uni Eropa. Hingga pada tahun 2003, Kroasia berusaha mengajukan aplikasi keanggotaan Uni Eropa, dan pengajuan aplikasi keanggotaan tersebut mendapatkan respon yang baik dari Uni Eropa, karena Uni Eropa bersedia melakukan peninjauan di Kroasia. Untuk menjadi anggota dari Uni Eropa, kroasia harus memenuhi kriteria *Copenhagen* yang diajukan oleh Uni Eropa. Namun berbagai hambatan dialami oleh Kroasia untuk mendapatkan status keanggotaan dari Uni Eropa. Akan tetapi hambatan-hambatan tersebut dapat dilalui oleh Kroasia, sehingga negosiasi antara Kroasia dan Uni Eropa dapat berjalan dengan baik. Atas usaha Kroasia yang telah berhasil memenuhi persyaratan dari Uni Eropa, akhirnya Kroasia berhasil menjadi anggota dari Uni Eropa. Skripsi ini memiliki pembahasan yang sama dengan apa yang sedang

¹⁴ Panji Noor Hamzah, 2015, *Bergabungnya Kroasia Menjadi Anggota Uni Eropa*, Skripsi, Jakarta: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Hal. 1-89

penulis teliti, dan didalam skripsi ini juga dijelaskan bagaimana Kroasia berupaya agar mendapat status keanggotaan baru dari Uni Eropa.

Pada skripsi tersebut menggunakan metode penelitian kualitatif dan diolah dengan konsep-konsep yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan konsep kepentingan nasional, konsep regionalisme serta konsep kebijakan luar negeri. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah keduanya menggunakan konsep kebijakan luar negeri dan sama-sama menjelaskan isi dari Kriteria Kopenhagen. Sedangkan perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah objek negara yang digunakan dalam skripsi tersebut berbeda dengan negara yang diambil oleh skripsi peneliti.

Penelitian keempat ditulis oleh **Faidah Rahim** dalam jurnalnya yang berjudul “**Clash of Civilisations: Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa**”¹⁵ Dalam paper tersebut dijelaskan mengenai hambatan apa saja yang diperoleh Turki pada saat mengajukan permohonan sebagai anggota Uni Eropa. Perluasan keanggotaan Uni Eropa pada akhirnya mendorong Turki untuk mengajukan permohonan untuk menjadi anggota Uni Eropa, namun pengajuan permohonan keanggotaan dari Turki tidak mendapatkan kejelasan dari Uni Eropa. Uni Eropa menganggap bahwa Turki yang mayoritas penduduknya beragama islam tidak sesuai dengan Uni Eropa, meskipun pada saat pemerintahan Attaturk Turki menjadi negara sekuler, namun sekularisme di Turki tidak diakui oleh negara-negara anggota Uni Eropa. Hal tersebutlah yang disebut-sebut menjadi penghambat akses Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Karena kebudayaan

¹⁵ Faidah Rahim, *Clash of Civilisations: Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa*, Jurnal Global& Policy Vol.1, No.2, Juli-Desember 2013, Hal.214-227

di Turki dianggap berbeda dengan kebudayaan Eropa. Selain hal tersebut, penolakan negara anggota Uni Eropa juga merupakan penyebab lain yang menghambat akses Turki untuk menjadi anggota Uni Eropa. Penolakan negara anggota Uni Eropa terhadap Turki mungkin saja akan berlanjut hingga masa mendatang, sehingga hal tersebut dapat menjadi tolak ukur mengenai akses Turki ke Uni Eropa dimasa mendatang. Jurnal ini dianggap memiliki pembahasan yang sama dengan penulis, karena dalam penelitian yang sedang penulis teliti selain mengungkapkan upaya-upaya yang dilakukan sebuah negara untuk bergabung dengan Uni Eropa, penulis juga menjabarkan bagaimana hambatan serta tantangan yang dialami sebuah negara dalam upayanya bergabung dengan Uni Eropa.

Jurnal yang dituli oleh Faidah Rahim tersebut menggunakan pendekatan teori clash of civilization. Dalam jurnal tersebut memiliki persamaan dengan skripsi peneliti yaitu menjelaskan upaya suatu negara untuk bergabung menjadi anggota dari Uni Eropa. Namun dalam jurnal tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi peneliti yaitu dalam jurnal tersebut terdapat pembahasan mengenai faktor kebudayaan di Turki dan tidak menjelaskan mengenai isi dari Kriteria Kopenhagen secara keseluruhan, sedangkan dalam skripsi peneliti terdapat penjelasan mengenai Kopenhagen Kriteria secara keseluruhan.

Penelitian kelima ditulis oleh **Dr. Gazhi Ismail Rababa'a** dalam jurnalnya yang berjudul **“Turkey and the European Union”**¹⁶. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bagaimana upaya Turki bergabung dengan Uni Eropa, proses keanggotaan Turki tersebut terhambat karena banyak negara anggota Uni Eropa

¹⁶ Dr. Ghazi Ismail Rababa'a, *Turkey and the European Union*, International Journal of Humanities and Social Science, Vol.3 No.2, Special Issue January 2003, 96-107

menolak keanggotaan Turki. Selain itu Turki dianggap tidak mampu memenuhi kriteria *Copenhagen* yang menjadi kriteria wajib yang harus dipenuhi bagi negara calon anggota Uni Eropa. Turki sendiri ingin bergabung dengan Uni Eropa karena ingin meningkatkan perekonomian serta keamanan wilayahnya. Namun upaya Turki ini tidak membuahkan hasil, karena perbedaan sejarah antara Turki dan negara anggota Uni Eropa tidaklah sama, selain itu perbedaan agama juga menjadi penghambat lainnya. Turki sendiri sudah berusaha memenuhi persyaratan yang diajukan agar memperoleh keanggotaan Uni Eropa, mulai dari memperbaharui sistem pemerintahannya, namun tetap saja hal itu dianggap tidak cukup untuk memenuhi persyaratan menjadi anggota Uni Eropa. Jurnal ini memiliki topik yang sama dengan yang penulis teliti karena dalam jurnal ini memuat upaya yang dilakukan Turki untuk bergabung dengan Uni Eropa, lebih dari itu dalam jurnal ini juga memiliki bahasan lain yang relevan dengan apa yang penulis teliti, yaitu mengenai hambatan yang diterima Turki pada saat mengajukan permohonan keanggotaan di Uni Eropa.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Dr. Gazhi Ismail Rababa'a yang menggunakan pendekatan kepentingan nasional memiliki persamaan dengan skripsi peneliti yaitu dalam jurnal tersebut dijelaskan hal apa yang melatarbelakangi negara untuk bergabung dengan Uni Eropa, dan dalam skripsi peneliti juga menjelaskan hal-hal yang melatarbelakangi upaya Albania untuk bergabung menjadi anggota dari Uni Eropa. Meskipun kedua penelitian ini memiliki fokus negara yang berbeda, namun peneliti menggunakan jurnal ini

sebagai acuan untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi upaya negara untuk menjadi anggota Uni Eropa.

Penelitian keenam yang ditulis oleh **Yuni Pratiwi Utami**¹⁷ dalam skripsinya yang berjudul **“Kebijakan Luar Negeri Albania Dalam Penerimaan Pengungsi Suriah”**. Dalam penelitian tersebut dijelaskan tentang upaya Albania yang sebelumnya merupakan negara yang menganut sistem komunis kemudian ingin menjadikan negaranya menjadi negara demokrasi. Setelah terlepas dari pemerintahan komunis Albania berusaha bergabung dengan Uni Eropa. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Albania adalah dengan ikut serta menangani pengungsi yang berupaya masuk ke Uni Eropa. Terjadinya konflik di Suriah merupakan penyebab melonjaknya pengungsi di Uni Eropa seperti Jerman, Prancis, Swedia dan hal tersebut tidak dapat dikendalikan oleh Uni Eropa. Akhirnya Uni Eropa mengganti rute pengungsi menuju wilayah Balkan termasuk Albania. Albania yang merupakan negara calon anggota Uni Eropa akhirnya menerima pengungsi tersebut untuk membantu Uni Eropa mengatasi permasalahan mengenai krisis pengungsi, dan tetap membuka negaranya sebagai negara transit bagi para pengungsi meskipun Albania termasuk negara miskin di Eropa. Albania melakukan upaya penerimaan pengungsi dengan melakukan kerjasama dengan OSCE agar dapat membantu menjaga keamanan pengungsi yang akan melintasi Albania. Selain itu Albania juga bekerjasama dengan organisasi internasional seperti, UNHCR, IOM, UNICEF, ICRC dan Uni Eropa. Upaya-

¹⁷ Yuni Pratiwi Utami, 2018, *Kebijakan Luar Negeri Albania dalam Penerimaan Pengungsi Suriah*, Skripsi, Malang: Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Malang, Hal. 30-52

upaya yang dilakukan oleh Albania tersebut bertujuan untuk mencapai kepentingannya yaitu untuk menjadi anggota dari Uni Eropa.

Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Yuni Pratiwi Utami ini menggunakan pendekatan kebijakan luar negeri dalam perspektif konstruktivisme. Persamaan skripsi tersebut dengan skripsi peneliti adalah keduanya sama-sama menjelaskan upaya Albania untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Namun dalam skripsi tersebut memiliki perbedaan dengan skripsi peneliti karena dalam skripsi tersebut lebih menekankan upaya Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan cara melakukan penerimaan pengungsi dari Suriah, sedangkan dalam skripsi peneliti lebih menekankan upaya Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa dengan cara memenuhi Kriteria Kopenhagen. Skripsi ini menjadi acuan bagi peneliti karena terdapat banyak persamaan, terlebih dalam skripsi ini fokus negara yang diambil sama dengan negara yang diambil oleh peneliti, sehingga skripsi ini dapat menjadi acuan peneliti untuk menjelaskan apa saja yang dilakukan oleh Albania untuk menjadi anggota dari Uni Eropa selain melalui Kriteria Kopenhagen.

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu

No.	Nama/ Judul	Metodologi	Hasil
1.	“Implikasi Penerimaan Siprus Dalam Keanggotaan Uni Eropa Terhadap Penerimaan Turki Dalam Keanggotaan Uni Eropa” yang ditulis oleh Fany Dastanta	<ul style="list-style-type: none">- Eksplanatif- Pendekatan Neo-liberal institusionalis	<ul style="list-style-type: none">- Siprus mengajukan permohonan kanggotaan Uni Eropa pada tahun 1994 dan berhasil menjadi anggota dari Uni Eropa pada tahun 2004.- Penerimaan Siprus

			menjadi anggota dari Uni Eropa dianggap sebagai faktor penghambat bagi Turki yang ingin bergabung dengan Uni Eropa.
2.	<p>“Diplomasi Turki: Studi Tentang Langkah-Langkah Turki Untuk Menjadi Anggota Uni Eropa Pada Masa Perdana Menteri Erdogan” (2002-2007) yang ditulis oleh Kurnia Wira.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif - Diplomasi multilateral 	<ul style="list-style-type: none"> - Turki mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa dengan cara melakukan diplomasi dengan negara-negara anggota Uni Eropa. - Uni Eropa menolak keanggotaan Turki, karena Turki dianggap belum memenuhi kriteria <i>Copenhagen</i>
3.	<p>“Bergabungnya Kroasia Menjadi Anggota Uni Eropa” yang diulis oleh Panji Noor Hamzah</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Kualitatif - Konsep kepentingan nasional - Konsep regionalisme - Konsep kebijakan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> - Proses masuknya Kroasia menjadi anggota dari Uni Eropa berlangsung selama 10 tahun. - Kroasia diteliti sesuai standart Uni Eropa dengan menggunakan Kriteria Kopenhagen.
4.	<p>“Clash of Civilisations: Hambatan Akses Turki ke Uni Eropa ” yang ditulis oleh Faidah Rahim</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal - Teori clash of civilization 	<ul style="list-style-type: none"> - Turki mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa. - Permohonan yang diajukan oleh Turki mendapat banyak penolakan dari negara anggota Uni Eropa. - Faktor perbedaan kebudayaan dan agama dianggap menjadi salah satu

			alasan penolakan Turki untuk menjadi anggota dari Uni Eropa.
5.	“Turkey and the European Union ” oleh Dr. Gazhi Ismail Rababa’a	<ul style="list-style-type: none"> - Jurnal - Konsep kepentingan nasional 	<ul style="list-style-type: none"> - Turki mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa dilatarbelakangi oleh kepentingan politik, sosial dan ekonomi. - Namun pengajuan permohonan Turki ditolak karena dianggap belum mampu memenuhi Kriteria Kopenhagen.
6.	“Kebijakan Luar Negeri Albania Dalam Penerimaan Pengungsi Suriah” ditulis oleh Yuni Pratiwi Utami	<ul style="list-style-type: none"> - Eksplanatif - Teori kebijakan luar negeri dalam perspektif konstruktivisme 	<ul style="list-style-type: none"> - Albania melakukan penerimaan pengungsi dari Suriah sebagai salah satu cara agar dapat menjadi anggota Uni Eropa - Dalam penerimaan pengungsi Albania bekerjasama dengan berbagai organisasi internasional - Tujuan Albania menjadi anggota Uni Eropa adalah untuk mencapai kepentingan negaranya seperti kepentingan politik dan ekonomi.
7.	“Upaya Albania Bergabung dengan Uni Eropa dengan Memenuhi Kriteria Kopenhagen” ditulis oleh Fransiska Sri	<ul style="list-style-type: none"> - Deskriptif - Konsep rezim internasional - Konsep kebijakan luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> - Albania mengajukan permohonan keanggotaan pada tahun 2009 serta berupaya memenuhi Kriteria

	Andayani		<p>Kopenhagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahun 2014 Albania berhasil mendapatkan status kandidat keanggotaan oleh Uni Eropa. - Albania melakukan upaya internal dengan memperbaiki sistem pemerintahan, ekonomi dan politiknya - Albania melakukan upaya eksternal dengan bekerjasama dengan berbagai negara seperti, Itali, Jerman, Uni Eropa dan kerjasama dengan USAID
--	----------	--	---

1.6 Kerangka Konsep

Untuk menjelaskan penelitian yang penulis sedang teliti, maka disini penulis menggunakan konsep rezim internasional dan konsep kebijakan luar negeri.

1.6.1 Konsep Rezim Internasional

Konsep rezim internasional merupakan sebuah upaya yang digunakan untuk memahami tentang alasan sebuah aktor melakukan kerjasama dengan aktor lain, baik antar perorangan maupun negara. Konsep rezim internasional dan organisasi internasional sering dikaitkan, hal tersebut karena rezim internasional dan organisasi internasional berjalan beriringan, dimana organisasi internasional dapat membentuk suatu rezim internasional yang berisi sebuah

prinsip, aturan, nilai dan prosedur pengambilan keputusan. Rezim internasional menyebabkan para aktornya mengabaikan pembuatan keputusan independen dan lebih mengedepankan pembuatan keputusan bersama.¹⁸

Konsep Rezim Internasional dikenalkan oleh John Gerrad Ruggie pada tahun 1974 yang berdampingan dengan konsep organisasi internasional. Menurut John Gerrad Ruggie rezim internasional adalah sekumpulan tujuan bersama, kebiasaan dan aturan, sumberdaya dan perencanaan organisasi serta komitmen yang disepakati oleh sekelompok negara untuk mencapai tujuan bersama.¹⁹

Sedangkan menurut Stephen D. Krasner Rezim Internasional sebagai kumpulan prinsip, norma, peraturan, dan prosedur pengambilan keputusan, baik secara eksplisit maupun implisit, demi menciptakan interaksi yang sesuai antar aktor internasional. Prinsip merupakan dasar yang digunakan aktor dalam berperilaku. Norma merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan serta dilakukan setelah prinsip melekat. Peraturan merupakan ketentuan maupun larangan spesifik atas suatu aksi, larangan ini juga dapat berubah-ubah sesuai dengan kepentingan para aktor yang turut terlibat didalamnya. Prosedur pengambilan keputusan merupakan praktik yang berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan umum, dimana dalam pembuatan dan pengimplementasian kebijakan umum membutuhkan suara dari banyak pihak yang ikut terlibat didalamnya agar bersifat lebih subjektif. Dalam rezim internasional ada aturan yang tidak hanya mengikat bagi perseorangan, tetapi aturan tersebut mengikat seluruh aktor yang

¹⁸ Citra Heninda, M.A, 2015, *Rezim dan Organisasi Internasional*, Malang: Intrans Publishing, hal. 3

¹⁹ Drs. Yanuar Akbar, MA., Ph.D, 2014, *Metodologi & Teori Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Refika Aditama, hal. 286

terlibat dalam rezim tersebut, baik perseorangan maupun negara. Hal tersebut juga mempengaruhi perilaku para aktor yang turut terlibat didalamnya sehingga berdampak besar pada hasil yang merupakan aturan baru yang digunakan untuk menyelesaikan suatu isu.²⁰

Rezim internasional terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan yang sama antar anggotanya, kepentingan-kepentingan tersebut tentunya akan diperoleh ketika para aktor berhasil bergabung dengan rezim internasional. Adanya keuntungan yang akan diperoleh bagi anggota merupakan faktor utama terjadinya kerjasama. Pada umumnya rezim internasional bersifat transparan, dimana para anggotanya dapat mengetahui apa saja keuntungan yang didapat ketika bergabung dengan sebuah rezim internasional. Kebutuhan akan rezim internasional akan muncul dimana antara aktor negara maupun non negara memiliki kepentingan yang sama dan saling bergantung antara yang satu dan lainnya, yang mana hubungan saling ketergantungan tersebut bisa saja memicu adanya konflik baru yang harus diselesaikan. Oleh karena itu dalam rezim internasional terdapat prinsip, norma, aturan, dan proses pengambilan keputusan untuk mengatur kewajiban-kewajiban dan menyelesaikan permasalahan antar anggota yang bisa saja muncul karena adanya saling ketergantungan antar anggota.²¹

Keberlangsungan rezim internasional tergantung kepada kepatuhan negara-negara anggotanya yang telah ditetapkan dalam suatu aturan yang dibentuk oleh rezim itu sendiri. Rezim internasional akan efektif apabila anggotanya patuh

²⁰Stephan D. Krasner, 1982, *Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables*, Dalam: Krasner, Stephan D. [eds.]. *International Organization*, Vol. 36/2. New York: Cornell University Press.

²¹ Op.Cit, Drs. Akbar Yanuar, MA., Ph.D, hal. 282

terhadap norma dan aturan yang telah dibentuk. Selanjutnya rezim juga akan efektif apabila tujuan yang sebelumnya sudah direncanakan terpenuhi. Sebagai sebuah lembaga yang diikuti oleh negara-negara, maka kelangsungan organisasi internasional bergantung pada kepatuhan para anggotanya yang telah ditetapkan dalam sebuah rezim. Rezim internasional akan dipatuhi oleh para anggotanya karena adanya beberapa faktor yang mempengaruhi rezim seperti, efisiensi, kepentingan dan norma. Efisiensi merupakan hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan suatu rezim karena setiap anggota rezim harus secara efektif melaksanakan aturan yang telah ditetapkan sehingga suatu rezim dapat berjalan secara efektif. Kepentingan merupakan hal yang dibawa oleh masing-masing negara ketika akan membentuk suatu perjanjian, dimana kepentingan tersebut merupakan dasar dari pembentukan perjanjian, oleh karena itu suatu perjanjian tidak akan terjadi apabila para aktornya memiliki kepentingan yang berbeda. Selanjutnya norma hukum internasional yang fundamental, dimana adanya norma tersebut menyebabkan negara-negara yang terlibat dalam rezim tersebut harus menaati perjanjian yang telah disepakati.²²

Hal yang diperlukan untuk bergabung dengan rezim internasional bukan hanya mengenai sumber daya pemerintahan dan posisi negosiasi formal, tetapi para aktor harus memiliki pengetahuan evaluasi yang berkaitan dengan situasi internal, niat yang kuat untuk bergabung dengan rezim, intensitas preferensi mereka dan kesediaan mereka untuk mematuhi kesepakatan meskipun dalam situasi yang merugikan dimasa depan. Sistem pemerintahan yang tertutup

²² Op. Cit, Citra Heninda, M.A, hal. 174

dianggap akan memiliki banyak kesulitan ketika ingin berpartisipasi dengan rezim internasional, berbeda dengan sistem pemerintahan yang terbuka yang dianggap mampu berpartisipasi dengan baik dalam rezim internasional. Sistem pemerintahan tertutup dan otoriter akan dipandang skeptis oleh para mitra potensial mereka, sehingga para mitra potensial mereka akan cenderung memilih negara dengan sistem pemerintahan yang lebih terbuka untuk bergabung dengannya.²³

Konsep ini digunakan penulis untuk menganalisis mengenai rezim internasional Uni Eropa melalui prinsip, norma, aturan, dan proses pembuatan keputusan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa sebagai sebuah rezim internasional. Uni Eropa sendiri dapat dikatakan sebuah rezim internasional karena rezim internasional sendiri dibentuk karena adanya tujuan yang sama antar anggotanya, dimana tujuan dibentuknya Uni Eropa didasari oleh keinginan negara anggotanya untuk mengakhiri perang antara negara tetangga yang terjadi di Eropa pada saat Perang Dingin. Uni Eropa sendiri didirikan oleh enam negara yaitu, Belgia, Prancis, Jerman, Itali, Luksemburg dan Belanda. Uni Eropa memiliki agenda untuk melakukan perluasan keanggotaan, dimana hal tersebut dilakukan Uni Eropa untuk menyatukan Eropa menjadi kesatuan yang utuh dan bebas.²⁴ Perluasan Uni Eropa sendiri akhirnya menyebabkan negara-negara di Eropa ingin bergabung menjadi anggotanya. Pada tahun 2009, Albania mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa secara resmi. Tentunya Albania dalam

²³ Robert O. Kohane, *The demand for international regimes*, Journal International Organization 36, 2 (Spring 1982), the Massachusetts Institute of Technology, hal. 346-348

²⁴ Kristin Archick dan Vincen L. Morelli, 2014, *European Union Enlargement*, Congress Research Service, <https://fas.org/sgp/crs/row/RS21344.pdf> 20 Juli 2019 [10.24 WIB]

usahanya untuk bergabung dengan Uni Eropa memiliki beberapa persyaratan dan aturan yang wajib dipenuhi, yaitu Kriteria Kopenhagen. Kriteria Kopenhagen sendiri merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu negara ketika ingin bergabung dengan Uni Eropa. Dalam hal ini Uni Eropa memiliki wewenang untuk membuat aturan dengan mengeluarkan Kriteria Kopenhagen yang mengikat negara-negara anggota ataupun negara-negara calon anggota yang ingin bergabung dengan Uni Eropa untuk tunduk dan patuh terhadap segala aturan yang telah dibentuk oleh Uni Eropa. Oleh karena itu Albania harus menjalankan semua prinsip, norma dan aturan yang telah dibentuk oleh Uni Eropa melalui Kriteria Kopenhagen. Nantinya keputusan apakah Albania akan diterima menjadi anggota Uni Eropa akan diputuskan oleh Dewan Eropa, karena dalam rezim internasional prosedur pembuatan keputusan dilakukan oleh setiap anggota yang terlibat dalam rezim internasional tersebut, dimana dalam studi kasus ini Dewan Eropa yang merupakan perwakilan dari setiap negara anggota Uni Eropa yang berwenang untuk memutuskan apakah Albania dapat menjadi anggota dari Uni Eropa.

1.6.2 Konsep Kebijakan Luar Negeri

Menurut Holsti, pemikiran mengenai output Kebijakan Luar Negeri dibagi dalam empat unsur, dimulai dari yang ruang lingkupnya bersifat umum hingga yang bersifat khusus yaitu: Orientasi/strategi politik luar negeri, peranan nasional, tujuan politik luar negeri dan tindakan. Tingkat keterlibatan suatu negara dalam berbagai masalah internasional menunjukkan ekspresi orientasi umum negara

tersebut terhadap dunia. Sedikitnya ada tiga bentuk orientasi umum yakni isolasi, non-blok dan persekutuan militer dan koalisi diplomatik.²⁵

Kebijakan luar negeri berasal dari dua konsep kunci yaitu kebijakan, dan luar negeri (*foreign*). Kebijakan adalah suatu bentuk tindakan yang meliputi:

1. Pemilihan objektif atau tujuan.
2. Mobilisasi sarana-sarana dalam upaya pencapaian tujuan tersebut.
3. Implementasi atau penggunaan upaya dan sumber daya dalam pencapaian tujuan yang dipilih.

Howard H. Lentner menyebut kebijakan luar negeri secara spesifik atau secara khusus tergantung pada sudut pandang dari negara manapun, dan tujuannya ditujukan terhadap semua yang berada di luar negara itu. Dengan demikian, kebijakan luar negeri jika dilihat dari definisi diatas merupakan suatu bentuk dari tindakan yang meliputi pemilihan tujuan, mobilisasi sarana-sarana dalam upaya pencapaian tujuan dan implementasi tujuan tersebut, dimana tindakan ini ditujukan atau berhubungan dengan semua yang berada di luar negara tersebut. sepanjang kebijakan suatu negara ditujukan pada masalah yang secara eksklusif berada dalam kekuasaan hukum negara tersebut, dan tidak mempengaruhi negara lain, maka kebijakan tersebut ditujukan langsung ke negara lain, atau memiliki dampak pada negara lain, kebijakan tersebut dapat dimasukkan sebagai kebijakan luar negeri.²⁶

²⁵ Op. Cit, Yanuar Akbar, Hal. 206.

²⁶ Ibid, hal.207

Politik luar negeri (*foreign policy*) merupakan strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya. Dalam hal ini ada beberapa langkah yang ditempuh dalam proses pembuatan politik luar negeri, yaitu: politik luar negeri sebagai *output* yaitu keputusan aktual dan isi dari kebijakan luar negeri, politik luar negeri sebagai *process* dalam pembuatan kebijakan luar negeri, politik luar negeri sebagai *behaviour* yaitu implementasi dari *output* yang merupakan tindakan nyata.²⁷

Sedangkan menurut Coplin untuk menentukan cara kerja kebijakan luar negeri dapat diamati dari situasi domestik suatu negara, kekuatan ekonomi dan militer serta konteks internasional. Situasi politik domestik suatu negara dapat mempengaruhi pengambilan keputusan kebijakan luar negeri. Politik domestik termasuk faktor budaya yang secara mendasar dipengaruhi oleh perilaku masyarakat dan kondisi politik yang sedang terjadi. Meskipun negara adalah aktor kebijakan luar negeri, individu adalah aktor yang memiliki tanggungjawab untuk membuat keputusan luar negeri. Individu tidak seperti negara, mereka memutuskan dan memainkan peranan kepentingan nasional, mengatur strategi dan membuat keputusan atau bahkan mengevaluasi keputusan yang sudah dijalankan. Dalam kasus beberapa negara, pemimpin suatu negara memainkan bagian yang dominan dalam proses pengambilan keputusan.²⁸ Menurut Coplin ada aktor-aktor domestik yang mempengaruhi kebijakan luar negeri yang disebut dengan *policy*

²⁷Ibid., hal. 210

²⁸ William de Coplin, 1992, "Introductions to International Politic: Teoritical Overview, dalam Sufri Yusuf, *Hubungan Internasional: Telaah dan Teoritis*, Bandung: Pustaka Sinar Baru, hal.30

influencers. Pembuatan keputusan membutuhkan dukungan dari *policy influencer* untuk memperkuat kebijakan luar negeri. Ada empat tipe *policy influencer* menurut Coplin:

1. *Bureaucratic influencer*, yang mengacu kepada individu dan organisasi eksekutif yang mendukung proses pengambilan keputusan untuk mengatur kebijakan luar negeri. Kelompok ini memiliki posisi penting dalam pembuatan kebijakan karena mereka membantu proses pengambilan kebijakan luar negeri serta memberikan informasi yang terkait dengan kebijakan dan birokrasi serta menjamin kebijakan tersebut akan memberikan manfaat bagi masyarakat.
2. *Partisan influencer*, mereka cenderung mempengaruhi politik elit dengan cara mempersiapkan individu yang akan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan.
3. *Intrest influencer*, yang terdiri dari berbagai individu yang memiliki kepentingan yang sama, tetapi mereka tidak memiliki power untuk menyuarakan kepentingannya. Namun mereka memiliki pengaruh yang cukup besar untuk mendukung *policy influencer*.
4. *Mass influencer*, opini publik merupakan salah satu aspek yang cukup berpengaruh dalam kebijakan luar negeri. Oleh karena itu opini publik sering dijadikan pertimbangan dalam kebijakan luar negeri.²⁹

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kebijakan luar negeri merupakan tindakan suatu negara untuk mencapai kepentingan nasionalnya

²⁹ *Ibid*, hal. 33

dengan cara mengeluarkan kebijakan yang berhubungan dengan aktor-aktor lain diluar negara itu sendiri.

Kebijakan luar negeri mencakup interaksi masing-masing negara dengan negara lainnya karena adanya saling ketergantungan. Dengan munculnya masyarakat internasional dan implikasi globalisasi, kebijakan luar negeri bagi setiap negara menjadi jauh lebih besar, karena itu kebijakan luar negeri menjadi sangat penting. Kebijakan luar negeri dirancang untuk mencapai agenda domestik dan internasional sesuai dengan kepentingan masing-masing negara yang melibatkan serangkaian aksi dimana politik domestik memiliki peranan penting. Dalam banyak kasus kebijakan luar negeri dirancang melalui koalisi antara aktor dan kelompok baik domestik maupun internasional. Ketika menganalisis aktor pelaksana kebijakan luar negeri terdapat banyak faktor yang dapat diidentifikasi untuk menjelaskan alasan dibalik keputusan yang diambil. Faktor-faktor tersebut mencakup kepribadian dan kognisi pemimpin, tingkat rasionalitas, politik domestik, kelompok kepentingan internasional dan domestik. Selain faktor tersebut, terdapat juga faktor eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri, seperti politik, militer dan ekonomi. Organisasi internasional juga disebut dapat mempengaruhi kebijakan luar negeri. Namun dari semua faktor tersebut, terdapat lingkungan politik domestik yang membentuk seluruh kerangka pengambilan keputusan dalam suatu negara bahkan dalam konteks internasional.³⁰

³⁰Zaara Zain Hussain, 2011, *The Effect of Domestic Politics on Foreign Policy Decision Making*, Diakses dari <https://www.e-ir.info/2011/02/07/the-effect-of-domestic-politics-on-foreign-policy-decision-making/> pada 6 Oktober 2018 [20.56 WIB] hal. 3

Dampak dari organisasi internasional cukup signifikan karena meningkatnya kekuatan masyarakat internasional dan hukum internasional. Organisasi internasional tidak diragukan lagi memiliki pengaruh terhadap masyarakat internasional, tetapi aktor pembentuk kebijakan dapat mengabaikan keputusan organisasi internasional tersebut untuk mencapai kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun organisasi internasional memiliki pengaruh terhadap kebijakan luar negeri negara-negara anggota, namun politik domestik tetap diutamakan. Keputusan terhadap kebijakan luar negeri suatu negara pada akhirnya diambil oleh kepala pemerintahan dengan pertimbangan terhadap politik domestik dan internasional. Kebijakan luar negeri dibuat dan dilaksanakan dalam lingkungan domestik dan internasional yang kompleks. Politik domestik mempengaruhi keputusan kebijakan luar negeri dan jika kebijakan tersebut tidak diterima oleh masyarakat domestik, maka kebijakan tersebut tidak akan berhasil dalam konteks internasional.³¹

Semua aktor pembuat kebijakan luar negeri terbentuk sesuai dengan keadaan dan situasi lingkungan hidup dimana mereka berada. Peraturan hukum, konstitusional dan politik dimana mereka membuat keputusan sebagian besar membentuk hasil kebijakan, oposisi politik yang menghasilkan kendala dan insentifitas dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Rezim mendefinisikan secara mendasar esensi hubungan negara dan masyarakat merupakan sumber legitimasi bagi pemimpin mereka dan batas-batas atas perilaku mereka dalam bernegara. Oleh karena itu, pembuat kebijakan luar negeri selalu berbeda secara

³¹Ibid, hal.8

mendasar. Perbedaan antara jenis rezim berdampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan luar negeri sehingga mempengaruhi kemampuan pembuat keputusan, kesediaan, atau keinginan untuk melakukan perubahan kebijakan luar negeri. Rezim berjalan beriringan dengan negara dan masyarakat, pemerintah dan yang diperintah, dengan implikasi untuk kepentingan kepemimpinan, ideologi, otonomi, sumber legitimasi dan oposisi, dan akuntabilitas yang berdampak langsung terhadap kemampuan negara melakukan perubahan kebijakan luar negeri.³²

Rezim didefinisikan sebagai seperangkat aturan, praktik, dan norma yang membentuk bagaimana pemerintah dibentuk dan diatur. Karakteristik rezim meliputi: keterbukaan institusi politik negara, daya saingnya pada proses seleksi untuk para pemimpin baru, jumlah keterlibatan warga negara dalam proses politik yang diizinkan atau ditoleransi, tingkat batasan hukum dan lembaga yang memegang kekuasaan, serta keberadaan dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Rezim didunia umumnya dikenal sebagai rezim demokratis (terbuka dan kompetitif) atau rezim otoriter (tidak demokratis - tertutup dan dibatasi).³³

Adanya konflik dalam setiap negara menyebabkan negara untuk melindungi kepentingan nasional negaranya. Hal tersebut bisa terjadi apabila adanya perubahan-perubahan perilaku dari konflik ke kooperatif antar negara dengan cara ikut serta dalam sebuah rezim atau organisasi internasional. Mereka mengejar kepentingan bersama dan bentuk kooperatif yang selalu ingin dimiliki oleh semua negara seperti, perdamaian, keadilan dan cara hidup yang lebih baik.

³² David B. Huxsoll, 2003, *Regimes, institutions and foreign policy*, Disertasi, Fakultas Ilmu Politik Louisiana State University, Hal. 36

³³ Ibid, hal. 37

Peperangan antar negara telah memberikan jalan kepada bentuk baru dari organisasi internasional. Bentuk organisasi negara yang baik memungkinkan kemajuan moral dalam masyarakat domestiknya dan bentuk terbaik dari organisasi pemerintahan tersebut adalah demokrasi. Melalui pemerintahan yang demokratis, rakyat dapat secara bebas menyuarakan pendapatnya dan tidak represif. Hal tersebut membuktikan bahwa negara demokratis mengembangkan hubungan sosial internasional di antara mereka yang bersifat kooperatif dan bukan konflik. Untuk dapat bergabung dengan organisasi internasional sebuah negara diwajibkan menganut sistem pemerintahan yang demokratis, karena kemajuan moral akan tercipta diantara negara-negara yang demokratis.³⁴

Konsep kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri yang dikeluarkan oleh Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa. Dalam upayanya untuk menjadi anggota dari Uni Eropa, Albania harus memenuhi persyaratan keanggotaan yang terdapat dalam Kriteria Kopenhagen. Albania merupakan negara di Balkan Barat yang secara resmi mengajukan permohonan keanggotaan Uni Eropa pada tahun 2009, upaya Albania sendiri tidak lepas dari kepentingan-kepentingan yang ingin dicapai oleh Albania. Tak hanya itu pengaruh dari masyarakatnya yang ingin masuk ke negara-negara anggota Uni Eropa tanpa menggunakan visa juga menjadi salah satu faktor pendorong dikeluarkannya kebijakan luar negeri Albania untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa. Untuk bergabung dengan sebuah rezim internasional, negara harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam sebuah rezim yang akan diikuti

³⁴ Cynthia Weber, 2005, *International Relations Theory, A Critical Introduction*, Routledge, hal.40

tersebut. Untuk bergabung dengan Uni Eropa, Albania harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Uni Eropa melalui Kriteria Kopenhagen. Meskipun saat ini Albania masih mendapatkan status calon anggota, namun tidak menutup kemungkinan bahwa suatu saat Albania akan berhasil diterima sebagai anggota dari Uni Eropa atas upaya-upaya yang telah dilakukan.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Metode Analisis

Metode penulisan yang digunakan bersifat deskriptif, dimana penulis berupaya menjelaskan upaya pemerintah Albania untuk bergabung dengan Uni Eropa. Menurut Mohtar Mas'oed, penelitian yang bersifat deskriptif adalah penelitian yang berupaya untuk menjawab pertanyaan siapa, apa, dimana, kapan dan bagaimana. Sehingga metode penulisan deskriptif merupakan upaya untuk melaporkan apa yang terjadi.³⁵

1.7.2 Teknik Analisa Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis menggunakan teknik analisa data yang bersifat kualitatif, yaitu analisis yang mencari dan mengumpulkan data untuk menjadi bahan acuan dalam penelitian. Dengan memanfaatkan landasan konsep atau teori untuk mempermudah penelitian agar fokusnya sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

³⁵Mohtar Mas'oed, 1990, *Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi*, Jakarta: LP3ES, hal. 68

Penulis menggunakan metode kepustakaan atau Penelitian Kepustakaan (*Library research*). Dimana dalam mengumpulkan data digunakan metode literatur dengan cara menelaah buku-buku, makalah ilmiah, jurnal, koran, majalah, artikel dan sumber lainnya yang dianggap relevan dengan penelitian yang ditulis oleh peneliti. Selanjutnya data yang diperoleh kemudian akan dianalisa dengan menggunakan kerangka berfikir yang telah ditentukan.

1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu ruang lingkup batasan waktu dan batasan materi. Hal ini berguna untuk menghindari terjadinya penelitian yang memiliki jangkauan yang luas.

a. Batasan Waktu

Batasan waktu diperlukan agar penelitian yang dilakukan tidak memiliki masa waktu yang lama dan tidak relevan. Maka peneliti menerapkan batasan waktu dalam pembahasan peneliti. Penelitian ini hanya akan difokuskan mulai dari tahun 2009 dimana secara resmi Albania mulai mengajukan permohonan anggota untuk bergabung dengan Uni Eropa hingga tahun 2014 dimana pada tahun tersebut Albania berhasil memperoleh status calon anggota Uni Eropa.

b. Batasan Materi

Serupa dengan pemberian waktu, pemberian batasan materi juga akan dilakukan oleh peneliti dengan tujuan untuk tetap memperkecil fokus pembahasan

penelitian sehingga penulis dapat mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti. Pada penelitian ini penulis hanya akan berfokus pada upaya-upaya eksternal dan internal yang dilakukan oleh Albania untuk memenuhi Kriteria Kopenhagen sebagai syarat keanggotaan Uni Eropa, untuk mengetahui secara jelas apa saja isi dari Kriteria Kopenhagen dan apa tujuan dari Uni Eropa menetapkan Kriteria Kopenhagen.

1.8 Argumen Dasar

Upaya yang dilakukan Albania untuk memenuhi Kriteria Kopenhagen untuk memenuhi syarat keanggotaan Uni Eropa dimulai dengan perubahan rezim dinegaranya, yang sebelumnya menganut rezim otoriter berubah menjadi rezim demokratis, tak hanya itu Albania juga melakukan berbagai upaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan negaranya, karena hal tersebut merupakan syarat dari Kriteria Kopenhagen yang harus dipenuhi oleh Albania untuk menjadi anggota dari Uni Eropa. Konsep rezim internasional digunakan untuk menjelaskan upaya negara bergabung dengan rezim internasional. Dalam penelitian ini Albania berupaya memenuhi Kriteria Kopenhagen yang dibentuk dan diratifikasi oleh Uni Eropa. Albania berusaha memenuhi segala aturan yang tercantum dalam Kriteria Kopenhagen agar dapat menjadi anggota dari Uni Eropa. Hal tersebut tidaklah mudah, karena ada berbagai prinsip, norma, peraturan dan prosedur pembuatan keputusan yang harus dipenuhi oleh Albania agar dapat diterima oleh Uni Eropa serta negara anggota Uni Eropa lainnya, karena sesuai dengan prosedur

pengambilan keputusan, yang menentukan apakah Albania dapat diterima sebagai anggota Uni Eropa tidak hanya oleh satu aktor saja, tetapi juga ditentukan oleh aktor-aktor lain yang terlibat dalam proses pembuatan keputusan, dimana yang menjadi aktor dalam prosedur pembuatan keputusan di Uni Eropa adalah Dewan Eropa. Dewan Eropa yang beranggotakan setiap perwakilan negara dari Uni Eropa yang menentukan apakah Albania dapat bergabung sebagai anggota Uni Eropa atau tidak, sehingga Albania harus berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi segala aturan yang terdapat dalam Kriteria Kopenhagen. Konsep kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri suatu negara yang umumnya dilakukan untuk memenuhi kepentingannya. Kebijakan luar negeri Albania dilakukan dengan cara bergabung dengan rezim internasional yaitu Uni Eropa. Untuk dapat bergabung dengan rezim internasional negara harus mengikuti syarat dan ketentuan yang ada dalam rezim tersebut.

1.9 Struktur Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam skripsi ini penulis akan menjelaskan susunan bab per bab agar mudah dipahami oleh pembaca. Dalam skripsi ini akan dibagi kedalam lima bab.

Bab pertama akan menjelaskan tentang pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang menggunakan konsep rezim internasional dan konsep kebijakan luar negeri. Selain itu juga terdapat metode penelitian yang meliputi tipe penelitian, teknis analisis data, teknik pengumpulan data dan ruang

lingkup penelitian. Pada akhir bab satu terdapat argumen dasar dan struktur penulisan.

Pada bab dua terdapat penjelasan mekanisme pengambilan keputusan dan penerimaan calon anggota baru Uni Eropa. Selain itu juga terdapat penjelasan mengenai sejarah Uni Eropa dan upaya perluasan Uni Eropa serta tujuan Uni Eropa menetapkan Kriteria Kopenhagen. Selanjutnya juga terdapat pembahasan mengenai Kriteria Kopenhagen sehingga pada bab kedua ini akan diketahui bagaimana mekanisme penerimaan calon anggota Uni Eropa serta pembahasan tentang Kriteria Kopenhagen.

Pada bab tiga terdapat penjelasan mengenai upaya hubungan kerjasama Albania dan Uni Eropa. Selain itu secara luas akan dibahas mengenai upaya internal Albania untuk bergabung menjadi anggota Uni Eropa dengan memenuhi Kriteria Kopenhagen. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Albania tersebut meliputi upaya untuk memperbaiki sistem politik, ekonomi dan upaya penyetaraan legislatif.

Pada bab empat dalam bab ini akan dijelaskan apa saja upaya eksternal Albania untuk Memenuhi Kriteria Kopenhagen. Upaya eksternal yang dilakukan albania akan dibagi kedalam empat pembahasan. Pembahasan pertama mengenai upaya kerjasama Albania dan Itali dalam bidang ekonomi, yang mana upaya ini tentunya memiliki dampak positif bagi Albania untuk meningkatkan perekonomian negaranya. Tak hanya itu Albania juga melakukan kerjasama bilateral dengan Jerman, dimana Jerman saat itu turut memberikan dukungan untuk Albania agar menjadi anggota Uni Eropa. Selanjutnya juga akan dijelaskan

mengenai kerjasama perdagangan antara Albania dan Uni Eropa. Pada bagian akhir dari bab empat akan membahas mengenai kerjasama Albania dan USAID dalam bidang politik.

Bab lima berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab terakhir terdapat kesimpulan yang berisi pokok-pokok permasalahan serta hasil yang dibahas dalam skripsi ini, serta terdapat saran yang digunakan untuk penelitian selanjutnya.

Tabel Sistematika Penelitian

Bab	Bahasan Pokok
Bab I :	PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Manfaat Penelitian 1.4.1 Manfaat Akademis 1.4.2 Manfaat Praktis 1.5 Penelitian Terdahulu 1.6 Kerangka Teori dan Konsep 1.6.1 Konsep Rezim Internasional 1.6.2 Konsep Kebijakan Luar Negeri 1.7 Metodologi Penelitian 1.7.1 Metode Analisis 1.7.2 Teknik Analisis Data 1.7.3 Teknik Pengumpulan Data 1.7.4 Ruang Lingkup Penelitian 1.8 Argumen Dasar 1.9 Struktur Penulisan
BAB II:	Kriteria Kopenhagen sebagai syarat keanggotaan Uni Eropa 2.1 Sejarah Perkembangan Uni Eropa 2.2 Tujuan Uni Eropa menetapkan Kriteria Kopenhagen sebagai kriteria keanggotaan 2.3 Pembahasan dalam Kriteria Kopenhagen

BAB III:	<p>Upaya internal yang dilakukan Albania untuk memenuhi Kriteria Kopenhagen</p> <p>3.1 Hubungan Albania dan Uni Eropa</p> <p>3.2 Memperbaiki sistem politik</p> <p> 3.2.1 Sistem Demokrasi</p> <p> 3.2.2 Sistem penegakan hukum</p> <p> 3.2.3 Menjunjung tinggi HAM</p> <p> 3.2.4 Perlindungan Minoritas</p> <p>3.3 Memperbaiki sistem ekonomi</p> <p>3.4 Penyetaraan legislatif (<i>Acquis Communautaire</i>)</p>
BAB IV:	<p>Upaya eksternal Albania untuk memenuhi Kriteria Kopenhagen</p> <p>4.1 Kerjasama Albania dengan Italia dalam bidang ekonomi</p> <p>4.2 Kerjasama bilateral Albania dan Jerman untuk mendukung upaya Albania bergabung dengan Uni Eropa</p> <p>4.3 Kerjasama perdagangan antara Albania dan Uni Eropa</p> <p>4.4 Kerjasama Albania dengan USAID dalam bidang politik (demokrasi dan penegakan hukum)</p> <p>4.5 Pencapaian Albania dalam memenuhi Kriteria Kopenhagen</p>
BAB V :	<p>PENUTUP</p> <p>5.1 Kesimpulan</p> <p>5.2 Saran</p>